

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan isu keberlanjutan telah mendorong perubahan dalam cara perusahaan dinilai oleh berbagai pemangku kepentingan. Penilaian terhadap perusahaan kini tidak cukup hanya bertumpu pada capaian finansial, melainkan turut mempertimbangkan seberapa jauh perusahaan mengelola dampak aktivitasnya terhadap lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial, serta menerapkan tata kelola yang baik. Adanya perubahan ini mendorong timbulnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai keberlanjutan perusahaan. Salah satu konsep yang berkembang dalam merespons pergeseran ini adalah *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yakni kerangka evaluasi yang dirancang guna mengukur kinerja keberlanjutan bisnis beserta potensi nilai yang dihasilkan. Melalui kerangka ini, berbagai pihak seperti investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya memiliki acuan seragam dalam menilai komitmen dan praktik keberlanjutan yang dijalankan perusahaan (Saini et al., 2025).

Terdapat tiga dimensi cakupan ESG yang sifatnya saling melengkapi. Dimensi lingkungan menyoroti konsekuensi aktivitas bisnis terhadap alam, mencakup antara lain isu emisi, efisiensi sumber daya alam, serta upaya pelestarian ekosistem. Dimensi sosial berhubungan dengan komitmen perusahaan terhadap sesama manusia, praktik ketenagakerjaan yang adil, dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Adapun dimensi tata kelola berkaitan dengan sistem penataan

perusahaan yang mencakup sistem pengawasan, etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Biswas & Dygas, 2025).

Pandangan terhadap ESG telah bergeser dari yang semula sebagai persoalan etika maupun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, kini sebagai faktor yang memiliki implikasi ekonomi. Investor modern kini mempertimbangkan informasi non-keuangan saat proses pengambilan keputusan investasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi yang mengintegrasikan informasi ESG tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan etika dan sosial, tetapi juga oleh motif keuangan, sehingga investor dapat mengevaluasi perusahaan secara lebih menyeluruh dibandingkan sekadar mengandalkan data keuangan konvensional (Kräussl et al., 2024). Sejalan dengan itu, Aydoğmuş et al., (2022) menyatakan ESG berkorelasi positif dengan peningkatan nilai perusahaan dan profitabilitas, serta mampu mencerminkan risiko jangka panjang yang seringkali tidak terlihat dalam laporan keuangan tradisional. Dengan demikian, ESG berkembang sebagai instrumen penting untuk mengenali sekaligus mengelola risiko-risiko tersebut sehingga perusahaan dengan kemampuan pengelolaan ESG yang baik umumnya dipandang mempunyai fondasi bisnis yang semakin kokoh.

Peningkatan relevansi ESG dalam pengambilan keputusan investasi turut mendorong berkembangnya mekanisme pelaporan dan penilaian berkelanjutan. Fatemi et al. (2018) menjelaskan bahwa perhatian perusahaan terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menunjukkan peningkatan yang semakin besar. Bagi perusahaan multinasional besar yang beroperasi dalam lingkungan bisnis dengan tuntutan transparansi yang tinggi, pengungkapan ESG

tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keandalan serta memperkuat reputasi di mata para pemangku kepentingan. Perkembangan tersebut mendorong munculnya berbagai lembaga pemeringkat yang menyediakan skor ESG sebagai alat evaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara lebih objektif dan terstruktur. Investor institusional seperti manajer investasi dan dana pensiun pun mulai memasukkan indikator ESG dalam kebijakan investasinya sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko jangka panjang.

Di balik perkembangannya yang pesat, implementasi ESG di level global masih menanggung sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan terbesar adalah tidak adanya standar pelaporan yang benar-benar seragam antarnegara dan antarsektor industri. Perbedaan kerangka pelaporan dan tingkat pengawasan menyebabkan variasi dalam format serta kualitas pengungkapan ESG, di mana penilaian dari berbagai penyedia skor menunjukkan perbedaan yang substansial (Berg et al., 2022). Variasi kualitas pengungkapan ESG yang masih ditemukan antarperusahaan menunjukkan bahwa faktor-faktor internal perusahaan perlu ditelaah lebih lanjut.

Perbedaan dalam kualitas dan konsistensi pengungkapan ESG menunjukkan bahwa implementasi ESG tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal seperti regulasi dan tekanan pasar. Terdapat pula faktor-faktor internal yang lebih mendasar yang turut memengaruhi hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan komposisi dan orientasi dewan dalam mengelola perusahaan. Variasi skor ESG yang muncul antarperusahaan mengindikasikan adanya

perbedaan dalam komitmen, kebijakan, serta cara manajemen menetapkan dan menjalankan keputusan. Argumen ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan yang sanggup menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan bisnisnya lebih mampu mempertahankan daya saing dan mencapai kinerja yang optimal (van Zanten & van Tulder, 2021).

Dinamika perkembangan ESG ini pada kenyataannya tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan di negara maju, tetapi juga turut memengaruhi praktik bisnis di negara berkembang. Lingkungan regulasi di masing-masing negara juga berperan penting dalam mendorong peningkatan pengungkapan ESG (Friederich et al., 2021). Pengungkapan ESG di negara maju umumnya didorong oleh pengawasan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, sedangkan di negara berkembang, praktik tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak eksternal, seperti investor internasional dan lembaga global (Gati et al., 2024). *World Bank* (2024) mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berkembang berpendapatan menengah, di mana kesadaran terhadap praktik bisnis berkelanjutan terus menguat seiring tuntutan investasi berkelanjutan dan perubahan preferensi pemangku kepentingan (Pratiwi & Edeh, 2024; Sanjaya & Sianturi, 2024)

Perhatian terhadap praktik keberlanjutan semakin menguat seiring diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan lembaga keuangan, emiten, dan beberapa perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan secara periodik. Kebijakan ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai kewajiban, bukan sekadar pilihan sukarela (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023). Meski demikian, sejumlah perusahaan masih

menempatkan pelaporan keberlanjutan sebatas pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Keterbatasan sumber daya, pemahaman yang belum memadai mengenai konsep ESG, serta lemahnya insentif pasar turut memengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan di Indonesia (Perdana et al., 2025). Sejalan dengan kondisi tersebut, penelitian pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak selalu mencerminkan orientasi keberlanjutan jangka panjang, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor profitabilitas dan struktur permodalan perusahaan (Ghozali et al., 2026).

Kesenjangan implementasi ESG ini tergambar nyata dalam praktik perbankan Indonesia. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Berkelanjutan OJK (2023), dari total 107 bank yang beroperasi di Indonesia, hanya 24 bank atau sekitar 22% yang telah memiliki kebijakan internal keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan secara rutin. Di sisi lain, Bank Mandiri sebagai salah satu pelopor *green banking* di Indonesia telah menyalurkan portofolio hijau sebesar Rp122 triliun hingga kuartal III tahun 2023 dan menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan *digital carbon tracking* (Bank Mandiri, 2023). Sementara itu, data Bloomberg yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah bank dalam sampel masih mencatat *Environmental Score* bernilai nol pada awal periode penelitian. Kesenjangan yang begitu lebar ini mengindikasikan bahwa perbedaan kualitas pengungkapan ESG antarbank tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi yang berlaku seragam,

melainkan oleh faktor-faktor internal masing-masing bank termasuk karakteristik dewan yang dimiliki.

Pola kesenjangan ini juga mencerminkan perbedaan konteks kelembagaan antara Indonesia dan negara-negara maju yang banyak menjadi acuan literatur ESG. Di Eropa, tekanan untuk meningkatkan pengungkapan ESG datang dari dua arah sekaligus, yakni regulasi yang sudah mewajibkan pelaporan secara mendetail dan tekanan pasar dari investor (Gurol & Lagasio, 2023). Di Indonesia, meskipun regulasi sudah hadir melalui POJK 51/2017, porsi pembiayaan hijau nasional masih hanya sebesar 10,7% dari total portofolio pembiayaan pada tahun 2023 dan tekanan dari sisi pasar belum sekuat di Eropa (OJK, 2023). Kondisi ini menjadikan kajian tentang peran karakteristik dewan dalam mendorong pengungkapan ESG di Indonesia menjadi relevan, karena mekanisme yang terbukti efektif di negara maju belum tentu bekerja dengan cara yang sama dalam ekosistem kelembagaan Indonesia yang sedang berkembang (Gati et al., 2024).

Lebih spesifik dalam konteks perbankan, sektor ini memiliki posisi yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya karena menjalankan fungsi intermediasi sebagai perantara keuangan yang menjembatani kebutuhan pendanaan berbagai pelaku ekonomi dengan sumber dana yang tersedia di masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Bank memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah perkembangan aktivitas ekonomi dengan memberikan dukungan pendanaan kepada kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai otoritas keuangan di berbagai negara turut mendorong penerapan

kebijakan keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui pembentukan *Sustainable Banking and Finance Network* (SBFN) yang bertujuan untuk memperkuat praktik keberlanjutan dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional (Dikau & Volz, 2021).

Keputusan pembiayaan yang diambil oleh bank dapat menentukan jenis kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Maka dari itu, penerapan prinsip ESG dalam sektor perbankan menjadi semakin relevan karena bank tidak terbatas sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat berkontribusi untuk menunjang sistem perekonomian yang berkelanjutan. Relevansi ini semakin diperkuat oleh kondisi sektor perbankan Indonesia, di mana pada tahun 2026 terdapat 48 bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia namun tingkat pengungkapan ESG di antara bank-bank tersebut masih menggambarkan perbedaan yang cukup mencolok. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kualitas pengungkapan ESG sektor perbankan kemungkinan tidak hanya disebabkan karena tekanan dari luar perusahaan, sebaliknya oleh kebijakan dan mekanisme yang berkembang di dalam organisasi, termasuk karakteristik dewan yang dimiliki.

Dalam upaya mendorong implementasi penerapan prinsip ESG yang lebih efektif di sektor perbankan, peran tata kelola perusahaan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Menurut Mohammad (2026), mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengungkapan informasi keberlanjutan. Tidak hanya berperan dalam mengawasi kinerja manajemen, tata kelola perusahaan berperan sebagai kunci dalam

membentuk arah dan nilai dasar perusahaan termasuk dalam menentukan orientasi keberlanjutan yang dijalankan (Collevecchio et al., 2025). Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dewan dalam menetapkan arah kebijakan sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasinya (Basile et al., 2025).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran karakteristik dewan dalam menjelaskan variasi kualitas pengungkapan ESG. Ketiga karakteristik yang dikaji mencakup dimensi yang berbeda yakni ukuran dewan direksi mencerminkan kapasitas pengawasan, proporsi direksi perempuan merepresentasikan keberagaman gender, serta proporsi komisaris independen mencerminkan derajat independensi pengawasan. Kualitas pengambilan keputusan perusahaan berpotensi dipengaruhi oleh berbagai karakteristik dewan, seperti ukuran dewan direksi, keberagaman gender, dan independensi anggota dewan sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu (Lagasio & Cucari, 2019). Oleh karena itu, karakteristik dewan memengaruhi praktik pengungkapan ESG dalam perusahaan.

Dalam literatur *corporate governance*, ukuran dewan direksi atau *board size* menjadi salah satu karakteristik yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan perilaku dan keputusan perusahaan. Treepongkaruna et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar sering dikaitkan dengan kapasitas pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen, yang secara tidak langsung berkontribusi pada penguatan akuntabilitas atas pelaporan informasi non-keuangan perusahaan. Akan tetapi hambatan dalam proses pengambilan keputusan dapat muncul ketika jumlah anggota dewan menjadi terlalu besar, sehingga

berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan (Erben Yavuz et al., 2024). Sifat kontekstual hubungan antara ukuran dewan direksi dan pengungkapan ESG tercermin dari beragamnya hasil penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks sektor perbankan Indonesia.

Kehadiran perempuan dalam jajaran dewan juga menjadi sorotan yang banyak mendapat perhatian dalam penelitian tata kelola perusahaan. Anggota dewan perempuan cenderung menghadirkan beragam alternatif dalam penyusunan strategi dan prosedur organisasi berdasarkan perbedaan cara pandang tersebut memungkinkan dewan mengevaluasi berbagai alternatif secara lebih komprehensif sebelum menentukan keputusan (Guping et al., 2020). Namun efektivitas kontribusi perempuan dalam dewan tidak selalu bersifat langsung, karena menurut penelitian Menicucci & Paolucci (2024), pengaruh tersebut baru menjadi signifikan setelah jumlah perempuan dalam dewan mencapai ambang yang disyaratkan, yaitu minimal tiga orang. Tingkat keterwakilan perempuan dalam dewan pada perbankan Indonesia masih relatif terbatas, sehingga perlu dikaji apakah keberadaannya telah cukup memengaruhi kualitas pengungkapan ESG.

Keberadaan anggota dewan komisaris independen juga menjadi karakteristik yang penting dalam struktur tata kelola perusahaan. Arayssi & Tabaja (2020) menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat memperoleh kontribusi positif dari keberadaan dewan independen melalui perannya dalam memengaruhi arah kebijakan manajemen agar lebih selaras dengan tujuan perusahaan serta kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Keberadaan komisaris independen dapat

membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tetap mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan secara lebih meluas. Namun kualitas serta keterlibatan aktif dalam fungsi pengawasan menjadi faktor yang menentukan efektivitas komisaris independen. Oleh karenanya, proporsi komisaris independen dalam dewan sering dikaitkan dengan praktik pengungkapan ESG perusahaan.

Selain karakteristik dewan sebagai variabel utama, terdapat faktor-faktor lain pada level perusahaan yang berpotensi memengaruhi kualitas pengungkapan ESG secara bersamaan. Dua faktor yang paling sering diidentifikasi dalam literatur adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Perusahaan yang lebih besar umumnya menghadapi tekanan pemangku kepentingan yang lebih luas sehingga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengungkapkan informasi non-keuangan secara lebih komprehensif (Brammer et al., 2009). Profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) dipilih sebagai proksi karena mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki, yang relevan dengan karakteristik operasional perbankan sebagai bisnis berbasis aset (Gurol & Lagasio, 2023). Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini sebagai variabel kontrol, penelitian ini dapat mengisolasi pengaruh karakteristik dewan terhadap pengungkapan ESG secara lebih akurat.

Sejumlah studi terdahulu telah berupaya mengeksplorasi keterkaitan antara komposisi dewan dengan praktik keberlanjutan perusahaan yang tercermin dalam kinerja ESG (Basile et al., 2025; Itan et al., 2025; Menicucci & Paolucci, 2024; Musa et al., 2025; Perdana et al., 2025). Penelitian terdahulu masih menyisakan

setidaknya tiga kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, dari sisi geografis, konteks negara berkembang seperti Indonesia masih relatif jarang menjadi fokus penelitian. Kedua, dari sisi sektoral, kajian yang secara spesifik menempatkan sektor perbankan sebagai objek penelitian masih sangat terbatas. Ketiga, dari sisi dimensi ESG, sebagian besar penelitian masih menggunakan skor ESG secara keseluruhan tanpa membedakan dimensi lingkungan dan sosial secara terpisah, padahal kedua dimensi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Penelitian ini sengaja tidak menyertakan *Governance Score* sebagai variabel dependen karena karakteristik dewan yang menjadi variabel independen sudah menjadi kesatuan dari dimensi tata kelola itu sendiri, sehingga memasukkannya berisiko menimbulkan tumpang tindih konseptual. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan yang meliputi ukuran dewan direksi, proporsi direksi perempuan, serta proporsi komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan dimensi lingkungan dan sosial ESG pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin menjadi perhatian dalam menilai keberlanjutan perusahaan, termasuk pada sektor perbankan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, karakteristik dewan diyakini memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi non-keuangan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh karakteristik dewan terhadap

dimensi *Environmental* dan *Social Score* pada sektor perbankan di negara berkembang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja *Environmental Score* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah proporsi direksi perempuan berpengaruh terhadap kinerja *Environmental Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja *Environmental Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah proporsi direksi perempuan berpengaruh terhadap kinerja *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja *Environmental* dan *Social* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Environmental Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi direksi perempuan (*female board ratio*) terhadap *Environmental Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Environmental Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh proporsi direksi perempuan (*female board ratio*) terhadap *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Social Score* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil akhir diharapkan mampu memberi kegunaan berupa:

1. Sebagai tambahan kontribusi dan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan karakteristik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara karakteristik dewan dan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
2. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian guna mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan kinerja *Environmental* dan *Social* pada sektor perbankan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan berupa:

1. Bagi perusahaan perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran karakteristik dewan dalam mendorong penerapan praktik keberlanjutan serta meningkatkan kinerja *Environmental* dan *Social* perusahaan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi aspek tata kelola perusahaan serta kinerja keberlanjutan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.
3. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan tata kelola perbankan yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pengungkapan ESG, khususnya melalui pengaturan komposisi dewan yang mendukung implementasi keberlanjutan secara lebih optimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan karakteristik dewan dan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada berbagai sektor industri.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Direksi Perempuan, dan Komisaris Independen terhadap *Environmental* dan *Social Score* ESG pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” mencakup 5 (lima) bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang fenomena yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan kajian terdahulu yang diharapkan dapat memperkuat kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan hipotesis diharapkan akan diketahui dari setiap variabel penelitian yang telah ditentukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan definisi operasional variabel yang akan menjelaskan cara pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti, analisis data dan interpretasi hasil penelitian secara terperinci.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup simpulan berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan yang ditemukan, dan rekomendasi yang diungkapkan oleh peneliti yang didukung oleh bukti analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian.